

**“TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI POLEWALI MANDAR”**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

ANNISYAH PUTRI LESTARI
NIM.10400114137

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisyah Putri Lestari
NIM : 10400114137
Tempt /Tgl. Lahir : Campurjo, 25 Oktober 1996
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Daeng Tata I Blok III No. B3, Makassar
Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT
(DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI POLEWALI MANDAR

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, July 2018

Penulis

Annisyah Putri Lestari
NIM. 1040114137

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, *"Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Polewali Mandar"* yang disusun oleh Annisyah Putri Iestari, NIM: 10400114137, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, bertepatan dengan 19 Ramadhan 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, Gowa 4 Juni 2018 M.
19 Ramadhan 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I.	(.....)
Penguji II	: St. Nurjannah, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Erlina, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Darussalam Svamsuddin, M.Ag.

NIP. 19621916 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt tuhan semesta alam yang telah mencurahkan nikmat, karuni, rahmat dan petunjuk yang tak terhingga kepada penulis. Atas nikmat, karunia dan rahmat dan petunjuk itulah penulisan di berikan kesabaran, keuletan, kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat (*DESCENTE*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Polewali Mandar”** dengan tepat waktu.

Sholawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada baginda nabi besar Muhammad saw, nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari masa kebodohan sampai masa yang kecangihan dan ilmu pengetahuan saat ini. Semoga rahmat dan inayah Allah swt selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga sahabat dan ummatnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada sosok yang selalu ada buat penulis, sosok yang selalu mendoakan dan mensupport penulis, saat penulis berada di titik terbawah. Sosok itu ialah bapak saya Edy Hartono, mama saya Hasnawati dan adik saya Aisyah Mutiara Sari. Yang telah melahirkan , mendidik, membiayai, yang membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih untuk kasih dan sayangnya kepada penulis dan mungkin menulis tidak akan perna bisa membalas semua pengorbanan yang telah mereka lakukan.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada seluruh keluarga, sahabat, rekan-rekan yang telah memberikan motivasi, saran dan kritik yang

membangun kepada penulis sehingga penulis akhirnya sampai kepada akhir perjuangan untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, MSi, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Abd. Halim Talli M.Ag., selaku wakil dekan I, bapak Dr. Hamsir, S.H.,M.H., selaku wakil dekan II, bapak Dr. Saleh Ridwan M.Ag selaku wakil dekan III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqomah, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Rahman Samsuddin, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Erlina, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan bapak Ashar Sinilele, S.H M.H. dosen pembimbing II, bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I sebagai penguji I dan ibu St. Nurjannah S.H.,M.H. sebagai penguji II
5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff akademik fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar atas bantuan yang diberikan selama penulis kuliah di kampus UIN Alauddin Makassar ini.

6. Seluruh teman-teman angkatan 2014 fakultas Syariah dan Hukum terkhusus teman-teman Ilmu Hukum C 2014 yang telah menjadi kawan seperjuangan Selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini.
7. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam gank MMM, Ciciruit, Pondok Faris squad, Lampuara squad, Dian, Mina, Kiki, kaka Armhan Maulana Sudirman, Andong/Dilla, Shinta, kaka Imam Giffari, Karman, Dyan Ayu, Halim, dan seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak sempat penulis sebutkan.
8. Seluruh senior-senior, teman-teman, serta adik-adik lembaga Ikatan Pegiat Peradilan Semu (IPPS) yang telah mengajarkan, memotivasi, membuat pengalaman baru, keluarga baru bagi penulis. Banyak hal yang penulis dapatkan selama berlembaga di IPPS ini yang penulis tidak dapatkan di bangku kuliah. dan teman-teman delegasi dalam ajang kompetisi di Univ. Trisakti, Univ. Islam Indonesia dan Univ. Hasanuddin.
9. Para Hakim dan Staf Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.

Dengan penuh kerendahan hati dan keterbatasan penulis sangat menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan karya ini, agar lebih bermanfaat untuk kedepannya.

Makassar, July 2018

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITI	
A. Hukum Acara Perdata	11
B. Pengertian Perkara Perdata	13
C. Asas-Asas Hukum Acara	13
D. Pembuktian	16
E. Teori Kekuatan Pembuktian	21
F. Alat Bukti	24
G. Pemeriksaan Setempat	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Pelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data	48
D. MetodePengumpulan Data	49
E. Instrumen penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Perapan Hukum Pemeriksian Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Polewali Mandar	52

1. Keberlakuan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Polewai.....	53
2. Sistem Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.....	58
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemeriksaan Setempat.....	61
4. Kendala Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat	62
B. Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Mandar	63
1. Kasus Posisi	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
□ ِ	<i>fathah</i>	a	a
□ َ	<i>kasrah</i>	i	i
□ ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ ... اِيْ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu“ima*

عُدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينَ الله

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Annisyah Putri lestari
Nim : 10400114137
Fak/jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
**Judul : Tinjaun Yuridis Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam
 Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Polewali
 Mandar**

Skripsi ini berjudul Tinjaun Yuridis Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali.Mandar Pemeriksaan Setempat ini telah diamanakan dalam SEMA No.7 Tahun 2001. Pokok permasalahan pada penelitian ini baimana penerapan pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat dan bagaimana kekuatan hukum pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Polewali Mandar kab. Polewali Mandar prov. Sulawesi barat.

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian ini mengambil fakta-fakta yang ada dalam badan hukum atau badan pemerintahan yang memiliki dengan judul skripsi penulis. Penelitian ini di lakukan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber-narasumber yang berhubungan dengan skripsi ini, adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan skripsi ini..

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penerapan pemeriksaan setempat di pengadilan negeri polewali sudah berjalan sejak lama namun sampai saat ini masih banyak di temukan kendala-kendala saat proses pemeriksaan setempat ingin dilaksanakan. Dan kekuatan pembuktian setempat semuanya sepenuhnya kembali kepada majelis hakim Karena pada dasarnya pemeriksaan setempat ini masuk dalam teori pembuktian bebas .

Implikasi pada penelitian ini diharapkan masyarakat awam dan pihak Pengadilan tidak terjadi lagi kesalahpahaman saat melakukan Pemeriksaan Setempat yang mempersulit jalannya proses penyelesaian perkara dan pihak pengadilan diharapkan untuk selalu membawa aparat keamanan guna menjaga kesterilan saat proses Pemerisaan Setempat.

Kata Kunci : Pembuktian, Pemeriksaaan Setempat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.¹ Menurut Suyling membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tetapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).²

Seperti yang diketahui, hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang selanjutnya disingkat HIR dan *Rechtglement Buitengewesten* yang selanjutnya disingkat R.Bg, sedangkan secara materiil, hukum

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 496

²Wiersma, *Bewijzen In Het Burgerlijke Geding*, Themis 1996 Alf 5/6 Hal. 462, Dalam Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata Dalam Praktik* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Ugm), Yogyakarta, Liberty 1980, h. 12.

pembuktian mengatur bagaimana diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu.

Secara umum, beban pembuktian yang dianut oleh hukum acara di Indonesia adalah beban pembuktian yang berasaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula yang membantah hak orang lain wajib membuktikannya”.³ Asas tersebut dapat ditemukan dalam pasal 163 HIR yang berbunyi :

“Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atas menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”

Serta pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain maka menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Ketentuan dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdata merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian akan tetapi apabila hakim mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Kebenaran suatu pihak hanya dapat di peroleh melalui proses pembuktian ini dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya.⁴

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya

³ R. Susilo , *RBG/HIR dengan Penjelasan* (Bogor : Politeia,1995), h. 119

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VII (Yogyakarta : Liberty) h. 132

boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu (a) Bukti tulisan/Bukti dengan surat, (b) Bukti saksi, (c) Persangkaan, (d) Pengakuan, (e) Sumpah.⁵

Tidak jarang dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam mencari kebenaran formil melalui pembuktian disidang perkara perdata, ada kalanya hakim menemukan kesulitan-kesulitan dalam hal alat bukti yang satu bertentangan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Misalkan dalam sengketa tanah, sering ditemukan perbedaan mengenai fakta atau dalil yang diajukan oleh baik pengugat maupun tergugat. Tak jarang mengenai luas, batas dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah pelik karena apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan.

Dalam firman Allah swt menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

Terjemahnya;

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa

⁵[Http://Eprints.Ums.Ac.Id/31931/7/NASKAH%20PUBLIKASI.Pdf](http://Eprints.Ums.Ac.Id/31931/7/NASKAH%20PUBLIKASI.Pdf), 18 November 2017, 22.00 WITA

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan keadaan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁶

Sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab musnad ahmad dari ali bin abhi thalib :

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي» ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا

Artinya;

Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepada mu, maka janganlah kamu memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau tau bagaimana harus memutuskan hukum. Ali berkata; setelah itu aku selalu menjadu hakim yang baik.⁷

Penjelasan di atas menunjukan bahwa seorang hakim sebelum memberikan putusan atas perkara yang diadukan kepadanya, harus terlebih dahulu memahami aduan tersebut dengan baik dan jelas mengenai dua hal. *Pertama*; hakim harus tahu persis tentang duduk perkaranya secara detail yang meliputi antara lain : alasan dan dasar gugatan pengugat/tergugat, objek sengketa, hubungan hukum antara objek dengan pengugat/tergugat, dan lain-lain. *Kedua*; hakim harus tahu persis hukum yang mengatur mengenai gugatan tersebut dan mengetahui keputusan yang tepat mengenai gugatan itu. Dalam hal ini untuk menjatuhkan yang adil maka sudah seharusnya hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakat sebenarnya.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011) 4 :135

⁷ Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Al-Musnad li Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz II (t.t., Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 387

Dalam acara perdata terdapat tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum yang sering digunakan atau diterapkan. Misalkan untuk menentukan secara pasti dan defenitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang perkara, peradilan sering menerapkan pasal 153 HIR, pasal 180 R.Bg dan pasal 211 Rv dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 7 tahun 2001.

Hal ini menentukan bahwa hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan misalkan tanah, sawah dll , maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya ini pasti memenuhi kesulitan-kesulitan, sehingga hakim harus mempertimbangkan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaa setempat tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kesulitan-kesulitan tersebut mungkin dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat sendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya tidak memiliki pertimbangan lain sehingga hakim memutuskan memeriksa benda yang ada diluar persidangan. Pemeriksaan setempat tersebut dapat diajukan berdasarkan

putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak hakim sendiri karena jabatannya sebagaimana tertuang dalam pasal 211 Rv.⁸

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dalam penerapan pemeriksaan setempat perkara perdata sering terjadi kesulitan-kesulitan. Hal ini menyebabkan beberapa putusan yang tidak menerapkan sistem pemeriksaan setempat dan pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non-executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Misalkan letak, ukuran, dan batas-batasannya tidak jelas, seperti yang di jelaskan dalam SEMA No. 7 tahun 2001.⁹

Oleh karena adanya perbedaan inilah penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam skripsi ini.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Focus penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya di Pengadilan Negeri Polewali. Judul skripsi ini mengembangkan sejauh mana penerapan pemeriksaan setempat dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali.

⁸Rieya Aprianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata , Skripsi: Tidak Dierbitkan, Universitas Indonesia, 2012

⁹M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 781

2. Deskripsi fokus

Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta memberi persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dan memperjelas mengenai judul yang dimaksud, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel yang ada dalam skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang digunakan yaitu:

a. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat adalah persidangan pengadilan yang dilakukan ditempat objek perkara untuk melihat atau mengetahui keadaan sebenarnya dari objek perkara dimaksud. Pemeriksaan dilakukan oleh salah seorang atau lebih hakim anggota majelis dengan dibantu oleh panitera yang akan mencatat segal hal dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk memperjelas apakah objek yang dituangkan dalam gugatan benar adanya, dan letak, batas, luas sesuai dengan apa yang tertera dalam isi gugatan.

b. Pembuktian

Pembuktian yaitu upaya menyakini hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan sedangkan menurut Nashr Farid Washila, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna

¹⁰M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013) h.195

menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.¹¹

c. Perkara perdata

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (mis perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb).¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pemeriksaan setempat (*Descente*) dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Mandar?
2. Bagaimana kekuatan hukum pemeriksaan setempat (*Descente*) dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Mandar?

D. Kajian Pustaka dan Peneliti Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan berbagai rujukan teori yang terdapat dalam dari berbagai sumber literature hukum atau rujukan lainnya yang mempunyai relevansi dengan rencana peneliti. Adapun kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

¹¹M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*. h. 1

¹²<http://Www.Pn-Tanahgrogot.Go.Id/Perkara-Perdata/Layanan-Informasi-Publik/Perkara-Perdata>. Tgl. 05 Mei 2018. 02.00 WITA

1. M. Natsir Asnawi dalam bukunya tentang hukum pembuktian perkara perdata di Indoneisa menjelaskan bahwa kegunaan pemeriksaan setempat untuk mengetahui letak objek perkara, batas- batas perkara dan status dan riwayat objek perkara, namun dalam buku ini tidak dijelaskan prosedur atau tata cara dalam pemriksaan setempat.
2. Moh. Taufik makarao dalam bukunya tentang pokok-pokok hukum acara perdatan hanya menjelaskan tentang pembuktian secara umum, beban pembuktian dan alat-alat bukti, namun tidak menjelaskan tentang pemeriksaan setempat yang notabenenya merupakan bagian dari pembuktian

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan pemeriksaan setempat (*Descente*) dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Mandar?
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum pemeriksaan setempat (*Descente*) dalam pembuktian pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Polewali Mandar?

2.Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai pemeriksaan setempat (*descente*)

- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa atau pelanjar fakultas Hukum dan praktisi Hukum khususnya



TINJAUAN TEORITIS

Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan olehnya. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain.

Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*) tetapi ia harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ اَبَدًا اَبَدًا. اَمَّا بَعْدُ فَاَعْلَمُ اَنَّ

Terjemahnya;

Sesungguhnya Allah muncurh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu,. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.¹

Apalagi, jika pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutan secara damai, dia dapat minta bantuan penyelesaian melalui pengadilan.

¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011)

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*).

Peraturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.² MH. Tirtaamiddjaja (mantan hakim agung) mengatakan : “hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum acara perdata materiil”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua mahkamah agung) : “hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjanjian peraturan-peraturan hukum perdata”.³

Selanjutnya di jelaskan bahwa dengan adanya larangan untuk bertindak sendiri, sebaliknya harus ada jaminan bahwa dengan perantara-perantara badan hukum pemerintah, terutama pengadilan, dapatlah dilaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang seorang pada pergaulan hidup di tengah-tengah

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya bakti) h.10.

³Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. rineka cipta). h. 5.

masyarakat. Disinilah letak pentingnya adanya hukum acara perdata yang bermanfaat bagi masyarakat.⁴

B. Pengertian Perkara Perdata

Pengertian perkara perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.

Professor Dr. Sudirno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum acara perdata Indonesia menyatakan bahwa perkara perdata adalah “meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentious*) maupun yang tidak mengandung sengketa.

Dapat disimpulkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan di persidangan bukan hanya perkara yang mengandung sengketa saja tetapi dalam praktiknya juga terdapat penyelesaian perkara dengan *Yurisdiksi Voluntair* atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa⁵

C. Asas-asas hukum acara

Asas-asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dimana ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain itu juga asas-asas hukum acara perdata ini didasarkan atas HIR/RBg.⁶

1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman

⁴Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Acara dan Proses Persidangan* (Jakarta : Sinar Grafika: 2009) h. 5.

⁵Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta:Sinar Grafika, 2014) h. 5.

⁶Moh Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta). h. 12

2. Asas obyektivitas
3. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
4. Gugatan/permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan
5. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan
6. Beracara dikenakan biaya
7. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa
8. Sifat terbukanya persidangan
9. Mendengarkan kedua belah pihak

Beberapa asas yang di gunakan dalam hukum acara perdata yaitu :

1. hakim bersifat menunggu

Asas ini menjelasakn bahwa dalam pelaksanaanya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah justru perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium “*judex ne procedat ex officio*”, apabila tidak ada gugatan maka disitu tidak ada hakim.

2. Hakim bersifat pasif

Hakim bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau ruang pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas ataupun mempersempit pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi apa yang di tuangkan oleh pengugat dalam surat gugatan itulah ruang lingkup hakim.

3. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang diizinkan hadir dan mendengar pemeriksaan di persidangan. Jadi jika suatu persidangan tidak terbuka untuk umum maka akan berakibatkan putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali yang sudah diatur oleh undang-undang.

4. Mendengarkan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, tidak memihak. Jadi saat kedua belah pihak mengajukan argument masing-masing pihak majelis hakim harus tetap mendengarkan keduanya dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan putusan nantinya.

5. Putusan harus disertai dengan alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi :

- a. Biaya kepaniteraan
- b. Biaya panggilan
- c. Biaya materai
- d. Biaya lain-lainnya

7. Tidak ada keharusan mewakili

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaknya.⁷

D. Pembuktian

Dalam suatu proses perkara perdata hakim (Majelis) yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pengugat yang menurut hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak yang menyangkal/membantah dari tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya. Para pihak yang masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian.

Sedangkan maksud dari “*membuktikan*” dari pihak pengugat maupun tergugat itu berarti, memberi fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutan sebagaimana dalam gugatan pengugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sengkalan/bantahan dari tergugat.

Membuktikan berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta/fakta hukum dengan alat bukti sah, baik dari pengugat maupun dari tergugat. Akan tetapi tidak semua hal atau peristiwa itu perlu dibuktikan.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H bahwa hukum pembuktian memberikan aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim.⁸

⁷Bambang Sugeng, Sujayadi, . *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta : Prenadameia Graoup, 2012) h. 4-6

⁸Achmad ali. Wiwie heryani. *Asas-asas hukum pembuktian perdata* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 22

Penulis kurang setuju dengan pendapat tersebut karena menurut penulis apa yang paparkan oleh Prof. R. Subekti, S.H sangat luas, menurut penulis pendapat tersebut lebih condong kepada keseluruhan aturan hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara yang lain.

Penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Edward W. Cleary⁹ bahwa

*“the law of evidence is the system of rules and standards by which the admission of proof at the trial of law suit is regulated
hukum pembuktian adalah sistem aturan dan standar yang memungkinkan pengakuan bukti pada sidang gugatan hukum”*

Oleh karena itu, penulis merumuskan tentang batasan pengertian pembuktian sebagai berikut :

Hukum pembuktian adalah aturan dalam hukum acara yang pembuktiannya menggunakan alat bukti yang telah di jelaskan dalam pasal 1866 KUHPerdata ataupun ketetapan SEMA no 7 tahun 2001 yang tujuannya untuk menemukan fakta-fakta tentang suatu perkara yang berguna untuk pertimbangan hakim dalam pemutus perkara.

Didalam hukum acara perdata pembuktian menurut sistem HIR/RBg, hakim akan terikat pada ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal nya, ialah terikat pada pasal 163 HIR/283 RBg yang sebenarnya beraspek kebenaran formil, lain halnya dalam perkara pidana, bahwa yang dicari adalah kebenaran materiil. Sebaliknya, terdapat hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, antara lain “fakta notoir” ialah fakta-fakta yang sudah diketahui oleh umum atau khalayak ramai.

⁹ Achmad ali. Wiwie heryani. *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. h. 22

Masalah pembuktian menurut hukum acara perdata apabila dikaitkan dengan persoalan kepada siapa pihak yang harus membuktikan suatu hal atau peristiwa dalam suatu proses perkara nampaknya mudah, padahal tidak demikian, hal tersebut amat rumit.¹⁰

1. Yang harus di buktikan

Hukum tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 RBg dan pasal 50 ayat 1 Rv.

Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memberlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang ditetapkannya itu.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh pengugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim guna dasar pertimbangan daripada putusannya. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (*relevant material*) bagi hukum dan mana yang tidak (*irrelevant, immaterial*). Peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus di buktikan. Yang harus di buktikan adalah kebenarannya, sering dikatakan bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus di cari oleh hakim adalah kebenaran *formil*, berlainan dengan acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran *materiil*.¹¹

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara

¹⁰R.Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi* (Semarang : Mandar Maju) h.111

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogjakarta: liberty), h.38

a. Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan pengugat dan tergugat. Oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas yaitu mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu di wujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang di gugat dan apa yang diminta pengugat adalah benar, tetapi pengugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya. Oleh karenanya hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan , karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Walaupun hakim bersifat pasif, sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, hakim berwenang untuk menilah apakah yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian. Demikian penegasan putusan MA No. 288K/Sip/1973. Berdasarkan yurisprudensi tentang sistem hukum pembuktian dalam acara perdata , khususnya tentang pengakuan.

b. Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-faktayang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat di tegaskan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya.

Tidak semua fakta atau bukti yang diajukan bernilai sebagai alat bukti yang sah. Syarat utamanya, harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, sedangkan yang ditemukan di luar persidangan atau *out of court*, tidak dapat

dijadikan hakim sebagai dasar penilaian. Selain itu, bukti yang diajukan dipersidangan harus mampu membuktikan fakta konkret yang langsung berkaitan dengan materi pokok perkara yang disengketakan. Sedangkan bukti yang hanya mengandung fakta abstrak, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum.

c. Aliran baru menentang pasif-total, ke arah aktif-argumentatif

Uraian terdahulu memperlihatkan kedudukan hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran formil dalam perkara perdata bersifat pasif. Namun pada masa belakangan ini, muncul aliran baru yang menentang ajaran tersebut, aliran ini tidak setuju peran dan kedudukan hakim bersifat pasif secara total, tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif.

Hakim harus aktif dimana para pihak dapat atau berhak mengajukan bukti yang konkret maupun yang abstrak atau yang benar maupun yang tidak benar, namun hakim harus aktif menyaring dan menyingkirkan sesuai dengan kewenangannya menentukan pendapat dan kesimpulan yang akan di ambilnya. Oleh karena itu , kalau hakim mengetahui fakta atau bukti yang diajukan tidak benar, dan hal itu disangkal pihak lawan, hakim harus menyingkirkan atau menolaknya sebagai dasar penilaian pembuktian.¹²

2. Siapa yang membuktikan

Yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak.yang berkepentingan tidak lain adalah para pihak yaitu pengugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang

¹²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika,2015), h. 504

disengketakan dan bukan hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR, 283 RBg dan 1865 BW

Pasal 163 HIR yang berbunyi

“Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atas menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”

Serta pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain maka menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Jadi dalam hal ini dipisahkan antara yang harus membuktikan atau yang harus mengajukan alat-alat bukti, yaitu para pihak dan yang harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa yaitu hakim.¹³

E. Teori Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang melekat dalam alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Kekuatan pembuktian pada alat bukti terbagi terbagi atas dua yaitu kekuatan pembuktian yang melekat (kekuatan intrinsik) dan kekuatan pembuktian yang dipengaruhi oleh suatu keadaan di luar alat bukti itu (kekuatan ekstrinsik)¹⁴

1. Kekuatan pembuktian instristik

Kekuatan pembuktian instrinsik adalah pembuktian yang sifatnya ditetapkan oleh undang-undang dimana kekuatannya ini melekat pada alat bukti dan pembuktiannya hanya dapat dipengaruhi oleh keadaan di luar alat bukti itu sendiri.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogjakarta: liberty), h. 139

¹⁴ M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h. 40

Contoh pembuktian instristik yaitu alat bukti autentik yang memenuhi ketentuan pasal 284 RBg dan 1868 KUHPerdara, sumpah pemutus (*decisoir eed*) dan sumpah penaksir (*taxatoir eed*).

2. Kekuatan pembuktian ekstrinsik

Kekuatan pembuktian ekstrinsik adalah kekuatan pembuktian yang lahir karena faktor dari luar alat bukti itu. Dimana faktor tersebut sangat mempengaruhi kekuatan pembuktian suatu alat bukti.

Contoh kasus mengenai kekuatan pembuktian ekstrinsik yaitu akta otentik yang pada dasarnya menurut undang-undang adalah mengikat dan sempurna, namun jika akta itu terbantahkan kebenarannya oleh pihak lawan maka akta otentik tersebut turun menjadi bukti permulaan

Kekuatan pembuktian suatu alat bukti akan mempengaruhi penilaian hakim terhadap alat bukti dimaksud penilaian hakim terhadap alat bukti tersebut selanjutnya akan berpengaruh terhadap keputusan yang nantinya diambil oleh hakim. Dalam praktiknya, dikenal enam tingkatan kekuatan pembuktian alat bukti, sebagai berikut¹⁵

a. Kekuatan bukti permulaan (*Begin Bewijskracht*)

Kekuatan bukti permulaan adalah kekuatan bukti pada alat bukti yang belum memenuhi batas minimal pembuktian. Dimana alat bukti ini belum bisa membuktikan apa-apa sehingga harus di dukung dengan minimal satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian.

Suatu alat bukti yang padanya melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dapat turun menjadi kekuatan bukti permulaan jika dibantah oleh pihak lain.

¹⁵M. Natsir Asnawi. *Hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia* . h. 42

b. Kekuatan pembuktian bebas (*Vrij Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian bebas adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang penilaian dan penghargaaannyadiseraahkan kepada hakim. Undang-undang mengatur beberapa alat bukti yang penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Misalkan alat bukti kesaksian dimana nilai kesaksian yang dikemukakan oleh para saksi yang memenuhi syarat formil dan materil diserahkan sepenuhnya kepada hakim apakah kesaksian tersebut bernilai pembuktian atau tidak.

c. Kekuatan pembuktian sempurna (*Volledig Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Cukup dalam arti bahwa alat bukti tertentu tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, maupun hak dan kewajiban. Sebagai contoh sertifikat tanah sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan hak milik seseorang atas tanah di dalam sertifikat tersebut, tanpa membutuhkan keterangan saksi atau alat bukti lainnya.

d. Kekuatan pembuktian mengikat (*Bindende Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian mengikat adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu. kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau di buktikan oleh alat bukti tersebut.

e. Kekuatan pembuktian menentukan (*Beslissende Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian menentukan adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang eksistensinya menentukan putusan suatu perkara. Dengan adanya alat bukti tersebut maka persengketaan di antara para pihak dapat di putuskan

Alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya. Sumpah pemutus (*decisoir edd*) adalah salah satu alat bukti yang eksistensinya menentukan dan setelah diucapkan mengakhiri persengketaan diantara para pihak.

f. Kekuatan pembuktian memaksa (*Dwingen Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian memaksa adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang eksistensinya memaksa para pihak untuk menyakininya dan menerima konsekuensi yang dilahirkan dari alat bukti tersebut. Salah satu alat bukti yang merepresentasikan kekuatan memaksa dari alat bukti adalah sumpah *li'an*.¹⁶

F. Alat Bukti

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penialian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat atau dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Diluar itu, tidak dibenarkan

¹⁶M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. h. 42-45

diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan diluar yang ditentukan undang-undang.

1. Tidak sah sebagai alat bukti
2. Oleh karena itu, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan

Sampai saat ini hukum pembuktian belum mengalami pembaharuan seperti yang terjadi di beberapa negara, para pihak yang berperkara maupun hakim masih tetap berpegang pada sistem lama. Sampai sekarang pengadilan belum berani melakukan terobosan menerima alat bukti berbentuk baru, diluar yang disebut dalam undang-undang.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara *enumerative* dalam pasal 1866 KUHPerdata, pasal 164 HIR, yang terdiri dari

a) Bukti tulisan

Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalkan huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya.

Alat bukti tulisan atau surat terbagi atas dua macam yaitu : akta dan tulisan atau surat-suara lain. Di mana akta ialah surat atau tulisan yang di buat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta ini ada dua macam pula yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.¹⁷

¹⁷Moh. Taufik makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009) h. 99

Akta otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan undang-undang dan di buat di hadapan pejabat umum yang berwenang contohnya notaris, camat. Sedangkan akta di bawah tangan ialah surat yang di tanda tangani oleh para pihak saja.

b) Bukti dengan saksi

Saksi adalah orang atau pihak yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Dalam black's law dictionary, saksi didefinisikan sebagai “ *one who testifies to what he has seen, heard, or other wise observed*”

Pembuktian dengan saksi sesungguhnya baru di perlukan saat bukti surat atau tulisan tidak mencukupi atau tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada. Salah satu contohnya keadaan diperlukannya pembuktian saksi adalah jika akta autentik dibantah kebenarannya oleh tergugat, maka akta autentik tersebut berubah menjadi bukti permulaan dan harus dibantu dengan minimal satu alat bukti lain agar mencapai batas minimal alat bukti.¹⁸

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi

Seorang saksi yang sangat dekat hubungan keluarganya dengan pihak-pihak yang berperkara dapat di tolak oleh pihak lawan, dan saksi sendiri dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Selanjutnya, oleh undang-undang, ditetapkan bahwa keterangan satu saksi tidak cukup. Artinya hakim tidak boleh mendasarkan putusannya tentang kalah

¹⁸M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 62

menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja, jadi kesaksian itu selalu harus di tambah dengan alat pembuktian lain.¹⁹

c) Persangkaan

Vermoedens atau yang lebih di kenal dengan persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Persangkaan ini merupakan sebuah kesimpulan yang di ambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan apa yang di pikirkan hakim tentang suatu perkara.

Terdapat 2 macam persangkaan yaitu persangkaan menurut undang-undang atau di kenal pula dengan *presumption juris* dan persangkaan berdasarkan fakta atau *presumption factie*.

presumption juris yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangka-persangat tersebut antara lain yaitu :

Pertama, perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya di anggap telah dilakukan untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang

Kedua, hal-hal yang oleh undang –undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan hutang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.

Ketiga, kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanyalah sebatas putusannya. agar dapat mengajukan kekuatan itu, pokok persoalan yang digunakan adalah sama

¹⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1983), h.181

dengan alasan yang sama dan juga terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Keempat, kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

Presumption tactie, yaitu persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, diserahkan sepenuhnya pertimbangan dan kebijakan hakim. Akan tetapi persangkaan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang penting dengan suatu ketelitian dan ada hubungan antara satu dengan yang lain. Persangkaan-persangkaan berdasarkan fakta hanya di bolehkan jika undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi.²⁰

d) Pengakuan

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang di akui. Hakim harus menganggap dan menerima suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar terjadi walaupun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi²¹.

Menurut R.Subekti, menamakan pengakuan sebagai alat bukti sebenarnya sangat tidak tepat dikarenakan jika apabila dalil dalil yang di kemukakan oleh salah satu pihak diakui oleh pihak lain, maka pihak yang mengajukan dalil tidak perlu lagi membuktikan dalil tersebut.

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan dimuka hakim, dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan. (pasal 1923 KUHPerdara). Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah merupakan bukti

²⁰Eddy O.S. Hiariej. *Teori Hukum Pembuktian* (Jakarta : Erlangga, 2012), h 87-89

²¹Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1983), h.183

yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkan, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu. (pasal 311 R.Bg/ 1925 KUHPerdara)²²

Pengakuan yang merupakan sebagai alat bukti terbagi atas tiga macam yaitu :

- 1) Pengakuan murni merupakan pengakuan tergugat mengenai seluruh isi gugatan pengugat. Contoh kasus : A mengugat B dengan alasan B berhutang kepada A sebesar Rp. 200.000.000,-, kemudian B mengakuai bahwa benar ia telah berhutang kepada A.
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan tergugat tetapi disertai dengan sangkahan terhadap sebagian gugatan. Contoh kasus : A mengugat B dengan alasan B berhutang kepada A sebesar Rp. 200.000.000,- dan belum di lunasi , kemudian B mengakuai bahwa benar ia telah berhutang kepada A namun dia sudah membayar hutang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 3) Pengakuan dengan klausul yaitu pengakuan tergugat yang disertai dengan klausul yang bersifat membebaskan. : A mengugat B dengan alasan B berhutang kepada A sebesar Rp. 200.000.000,-, kemudian B mengakuai bahwa benar ia telah aberhutang kepada A namun B sudah melunasi hutang tersebut.²³

²²Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta :Renika cipta, 2009) h.111

²³Achmad ali. Wiwie heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 95

e) Sumpah²⁴

Pengertian sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pertanyaan yang dikuatkan atas nama tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah takut untuk berbohong dan takut akan murka atau hukuman tuhan²⁵

Pitlo mengatakan, “Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada tuhan”

Sedangkan menurut Soedikno berpendapat bahwa sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukum olehnya.²⁶

Jenis sumpah sendiri ada tiga yaitu sumpah pemutus (*decisoir edd*) adalah sumpah yang di bebaskan dan di ucapkan salh satu pihak dalam persidangan ketika pihak yang mengugat sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatan.

Sumpah pelengkap (*suppletoir edd*) diatur dalam pasal 1940 KUHPerdara yang mengatur bahwa sumpah pelengkap dapat diperintahkan oleh hakim secara *ex officio* agar perkara yang sedang ditangani dapat di putus. Sumpah ini juga biasa disebut *pletory oath*.

²⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika,2015), h. 556

²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika,2015), h. 745

²⁶Wahyu Muljono. *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012) h. 117

Sumpah penaksiran (*aestimatoir eed*) dimana sumpah yang secara khusus digunakan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh pengugat.

Adalagi yang penting sebagai alat bukti, yaitu

- a) Pemeriksaan setempat ; pasal 153 HIR/ 180 Rbg
- b) Keterangan orang ahli tentang pendapatnya ; pasal 154 HIR/ 181 RBg²⁷

G.Pemeriksaan Setempat

Salah satu hal yang erat kaitanya dengan hukum pemuktian adalah “pemeriksaan setempat”. Secara Formil ia tidak termaksud alat bukti sesuai pasal 1866 KUHP Perdata atau Pasal 164 HIR maupun pasal 284 RBG. Namun demikian, pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui seperti yang diuraikan berikut ini :

1. Pengaturan

Sangat tidak tepat membicarakan tentang Pemeriksaan Setempat, tanpa mengetahui rujukanya dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu diketahui secara ringkas di mana dijumpai ketentuan hukum positif tentang hal tersebut.

a. Pada HIR

Diatur dalam pasal 153, hanya terdiri dari satu pasal dan ayat yang berisi ketentuan :

- 1. Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat digunakan hakim, sebagai keterangan dalam mengambil keputusan (ayat 1)

²⁷ R. Soeparman, hukum acara perdata dan yuris prudensi, (semarang: mandar maju), hal 118

2. Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditanda tangani oleh Hakim Komisaris dan Panitera tersebut (ayat 2)

Dapat dikatakan , secara ringkas ,tidak diatur berbagai hal yang erat kaitanya dengan pemeriksaan setempat.

b. Pada RBG

Sama halnya dengan HIR. Pada RBG pun hanya diatur dalam pasal 180. Terdiri dari 3 ayat, substansinya pun sama dengan pasal 153 HIR. Kelebihannya, terdapat pada ayat 3, yang mengatur pendelegasian Pemeriksaan Setempat Kepada Pengadilan Negeri ditempat objek perkara terletak.

c. Pada RV

Diatur dalam BAB II, Bagian 7, dengan judul : Pemeriksaan ditempat dan Penyaksiaanya. Terdiri dari Pasal 211-214 (Sebanyak 4 Pasal).

Dapat dilihat , apa yang diatur dalam RV, lebih luas. Sehubungan dengan itu, agar pembahasan lebih lengkap pada satu sisi, dikaitkan dengan Asas *Process doelmatigheid* pada sisi lain, uraian yang dikemukakan dalam tulisan ini, merujuk kepada RV tanpa mengabaikan apa yang telah digariskan oleh HIR dan RBG.

2. Pengertian

Sekedar gambaran , ada baiknya dikemukakan bunyi pasal 153 IR.

- a. Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan setempat tersebut, yang dapat menjadi keterangan Hakim.

- b. Panitera Pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara tersebut harus ditanda tangani oleh Komisaris dan Panitera Pengadilan tersebut.

Dari bunyi pasal diatas, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (gerechtlelijk plaatsopneming) yang berarti :

- 1) Proses pemeriksaan yang semestinya dilakukan diruang siang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan ditempat lain, yaitu ditempat letak objek barang perkara.
- 2) Persidangan ditempat itu, bertujuan untuk melihat objek itu ditempat barang tersebut terletak.
- 3) Dan yang melakukan persidangan ditempat itu, bisa salah seorang atau dua orang anggota Majelis yang bersangkutan, dibantu oleh seorang Panitera.

Dari Penjelasan diatas, pemeriksaan setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan ditempat objek barang perkara terletak, untuk melihat keadaan dan memeriksa objek perkara tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh salah seorang atau lebih Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak untuk membuat berita acara , serta dihadiri pula oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukum mereka.

Tujuan dari Pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai Letak, luas dan Batas objek barang perkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa,jika barang sengketa adalah barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-hujurat 6:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَنَّمَ فَتُصِبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu²⁸

Seperti yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaa setempat, sering terjadi dalam praktik peradilan, pada saat putusan hendak di eksekusi , objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaan dapat dikatakan *Non-executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek perkar tidak jelas dan tidak pasti. Misalnya letak, ukuran, dan batas-batasnya tidak jelas, Menurut SEMA tersebut, untuk menghindari terjadinya *Non-Executable* dalam menjalankan putusan pengadilan , sebaiknya Pengadilan Negeri megadakan Pemeriksaan Setempat berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, apabila objek barang sengketa terdiri dari tanah. Bila dianggap Perlu :

- a. Dilakukan pengukuran di setiap batas
- b. Membuat gambar situasi tanah

Apa yang dikemukakan dalam SEMA No. Tahu 2001 diatas , sejalan dengan Puusan MA No. 3537 K/Pdt/1984 . Menurut putusan ini , hasil pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah perkara, dengan demikia telah jelas

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), 6:49. h 516

letak dan luas tanah terperara secara definitive, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi rill atas putusan yang telah dijatuhkan.

3. Oleh Hakim atau atas Pemintaan dari Para Pihak

Berdasarkan pasal 153 HIR. Pasal 180 RBG atau Pasal 211 RV, pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan berdasarkan hal berikut :

a. Oleh Hakim Karena Jabatannya

Hakim karena jabatannya secara *Ex officio*, dapat menetapkan atau memerintahkan diadakanya pemeriksaan setempat ,apabila hal tersebut dianggap penting untuk mengetahui secara pasti keaaan mengenai objek gugatan. Sehubungan dengan hal tersebut,hakim perlu memperhatakan SEMA No.7 Tahun 2001 . Apabila dari hasil proses persidangan , terdapat kesan atau indikasi barang objek gugatan masih kabur, maka sangat tepat dan beralasan melaksanakan penggarisan SEMA melakukan pemeriksaan setempat, guna untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari.

Mengenai sejauh mana kewenangan hakim menetapkan atau memerintahkan pelaksanaan Pemeriksaan setempat, tidak hanya terbatas pada hakim tingkat pertama (PN) . Dapat juga dilakukan oleh Hakim tingkat banding dan kasasi . Jadi pengertian hakim berdasarkan jabatannya, meliputi hakim secara international. Perhatikan Putusan MA No.274 K/Sip/1976. Dalam perkara ini, hakim tingkat kasasi memerintahkan PN untuk melakukan pemeriksaan setempat yang disertai dengan Pengukuran oleh BPN . Begitu juga dalam putusan MA No.436 K/Sip?1974 . Dalam perkara ini pun tingkat kasasi memerintahkan PN untuk mengadakan Pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah yang berperkara.

b. Atas permintaan Para Pihak

Cara yang kedua, yaitu atas permintaan dari para pihak . Atas permintaan salah satu pihak maupun permintaan dari kedua belah pihak ,dapat dilakukan pemeriksaan permintaan setempat. Hak para pihak tentang ini ditegaskan dalam pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 RV, bahwa atas permintaan para pihak, dapat diadakan pemeriksaan setempat.

Permintaan tersebut dapat dilakukan apabila salah satu pihak lawan membantah kebenaran letak,luas , dan batas-batas tanah objek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan yang pasti, maka sangat penting dilakukan pemeriksaan setempat. Seperti yang dapat dilihat pada putusan No. 274 K/ Sip/ 1976 maupun No. 436 K/ Sip/ 1974 , hakim tingkat kasasi berpendapat, letak dan ukuran luas atau batas-batas tanah yang terperkara belum jelas dan pasti, sehingga dianggap sangat urgent untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Apakah diperlukan persetujuan para pihak ? misalkan , hakim menetapkan atau memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat , apakah hal tersebut harus disetujui oleh pihak yang berperkara ? ataukah jika penggugat meminta untuk dilakukan pemeriksaan setempat apakah harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak tergugat ? Jawabanya Yaitu Tidak diperlukan Persetujuan. Namun demikian dapat menimbulkan hal dilematik berkaitan dengan ketentuan pasal 214 RV .

Menurut pasal ini , apabila hakim yang memerintahkan pemeriksaan setempat, maka hakim dapat menentukan siapa yang harus membayar biaya panjar perkara terlebih dahulu. Misalnya hakim menetapkan bahwa penggugat yang harus membayar panjar biaya perkara . Atas penetapan itu penggugat menolak untuk membayar. Apakah penolakan tersebut tidak sama artinya tidak menyetujui pemeriksaan

setempat ? Dan apa akibat yang harus ditanggung pengugat atas penolakan tersebut ? Dalam kasus ini, Penolakan tersebut tidak sama dengan persetujuan , tetapi bermakna pengingaran melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukum kepadanya, dalam hal ini pasal 214 ayat 2 RV. Kepadanya dapat ditimpahkan akibat hukum, yaitu keingkaran itu merupakan fakta di persidangan yang dapat dijadikan alasan kerugian kepentingannya.

Bagaimana halnya apabila pihak yang dibebani maupun pihak lawan tidak mau atau ingar untuk membayar panjar biaya yang diperintahkan hakim. Jawaban merujuk pada pasal 160 ayat 2 HIR. Jika yang diperintahkan itu kedua belah pihak enggan untuk membayar panjar biaya perkara , maka pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan atau perbuatan yang diperintahkan tidak dapat dilakukan.

4. Perintah Dituangkan dalam putusan Sela

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat , didasarkan pada perintah Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Perintah tersebut berdasarkan pasal 153 HIR, pasal 180 RBG secara samar dituangkan dalam bentuk Putusan Sela. Namun dalam pasal 211 RV, perintah penuangan dalam putusan sela (*interlocutoir vonnis*) atau (*tussen Vonnis*) ditentukan secara tegas, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

a. Penunjukan pelaksana Pemeriksaan Setempat

Dalam putusan sela tersebut terdapat nama pejabat yang bertindak sebagai pelaksana terdiri dari :

- 1) Paling tidak salah satu dari Hakim Anggota Majelis

Jadi, minimum terdiri dari seorang hakim anggota majelis yang memeriksa perkara tersebut. Tetapi boleh juga lebih , misalkan terdiri dari dua Hakim anggota Majelis.

Dalam Versi HIR dan RBG, Hakim anggota yang ditunjuk menjadi pelaksana pemeriksaan setempat, disebut Komisaris. Dikatakan, untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, dapat diangkat satu atau dua orang Komisaris yang terdiri dari Hakim anggota majelis yang mengadili perkara. Dalam pasal 211 RV, juga hal tersebut disebut yang akan bertindak untuk melakukan pemeriksaan setempat diangkat dari seorang atau dua orang Anggota Majelis yang mengadili perkara. Tampaknya ketentuan ini tepat. Hakim anggota yang ikut memeriksa perkara, secara realistis dan objektif yang lebih tepat diangkat, karena mereka sudah mengetahui dan mendalami kasus yang sedang diperkarakan.

2) Disertai Seorang Panitera

Anggota Selanjutnya adalah seorang Panitera yang bertindak :

- a) Mendampingi Hakim Anggota Majelis
- b) Bertugas untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

3) Dapat dibantu Oleh Ahli

Tentang kebolehan mengikutkan ahli, disebut dalam pasal 211 RV, namun tidak bersifat mutlak, karena yang mutlak hanya Majelis Hakim dan Panitera. Sedangkan ahli bersifat Insidentil. Tergantung kepada kebutuhan dan keadaan. Jika dianggap perlu, dalam putusan sela dapat dimasukkan seorang atau beberapa orang ahli sesuai dengan objek barang sengketa. Kalau objeknya tanah maka dibantu oleh ahli dari Kantor BPN atau mengenai kapal dapat dibantu oleh ahli perkapalan dan sebagainya.

Terlepas dari penggarisan pasal-pasal yang dikemukakan, dibolehkan juga pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan secara komplet oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Pendapat yang demikian telah dijelaskan dalam putusan MA

No.316 K/Sip/1983. Dikatakan, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis Hakim dan Panitera yang bersangkutan, dianggap lebih sempurna dari ketentuan pelaksanaan yang digariskan pasal 180 RBG yang terdiri dari satu atau dua orang hakim Anggota Majelis. Menurut Putusan ini, Pelaksanaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara Komplet :

- a) Tidak dilarang pasal 180 RBG, atas alasan ketentuan pasal itu tidak bersifat Imperatif, tetapi Regulatif (aanvullend recht) ,
- b) Yang Penting diperhatikan, asal pihak yang meminta pemeriksaan setempat itu, tidak keberatan untuk membayar biaya panjar perkara.

Dengan demikian, kalau yang dibebani membayar biaya keberatan, maka tidak boleh dipaksakan pelaksanaannya oleh Majelis Hakim yang bersangkutan secara komplet.

b. Berisi Perintah yang harus diperiksa

Putusan sela memuat perintah mengenai hal-hal yang harus diperiksa :

- 1) Memang dibolehkan secara umum berupa rumusan yang memerintahkan pemeriksaan terhadap objek barang terperkara di tempat barang terletak.
- 2) Namun, yang paling baik adalah perintah itu di deskripsikan secara jelas dan rinci seperti memeriksa lokasi, ukuran, dan batas-batasnya atau jumlah dan kualitasnya.

Pokoknya harus disebutkan satu persatu mengenai hal yang harus diperiksa dan dinilai mengenai keadaan barang objek perkara. Prinsipnya, hasil yang ingin dicapai dari pemeriksaan setempat, agar dapat ditemukan fakta yang terang, pasti, dan definitif mengenai keadaan barang objek perkara. Berarti untuk mencapai hasil yang

demikian, dalam putusan sela harus ditegaskan apa saja yang mesti diperiksa dan dinilai.

5. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Suatu hal yang perlu diingat, pemeriksaan setempat bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau kapal. menurut pasal 211 ayat (2) Rv, dapat juga di perintahkan terhadap:

- a. benda gerak (*movable goods*),
- b. dengan syarat, apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan disidang pengadilan.

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, berpedoman kepada ketentuan Pasal 153, HIR, Pasal 180 RBG, Dan Pasal 211 R.

1) Dihadiri Para Pihak

Seperti dijelaskan, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. hanya tempat persidagannya yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat letaknya barang perkara. oleh karena itu, secara formil harus lengkap dihadiri para pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

Jadi, persidangan pemeriksaan setempat harus diberi tau secara resmi kepada para pihak. kalau hal itu sudah dilakukan, kemudian yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*), sidang pemeriksaan setempat dapat dilanjutkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari yang tidak hadir berdasarkan ketentuan pasal 127 HIR.

Dengan demikian, sebagai syarat formil, sidang pemeriksaan setempat harus dihadiri para pihak. namun apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tersebut. pemeriksaan tidak

boleh digantungkan kepada kehadiran para pihak,jika ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah

2) Datang Ke Tempat Barang Terletak

Proses sidang pemeriksaan setempat mesti di langsung di tempat lokasi barang itu terletak.pejabat yang diangkut atau ditunjuk:

- a) datang langsung di tempat barang yang hendak di periksa terletak,
- b) Setelah sampai di tempat ,hakim yang memimpin pemeriksaan,membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat,
- c) Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing,
- d) Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat yang semestinya di tegakkan,berlaku sepenuhnya pada sidang pemeriksaan setempat.

3) Panitia Membuat Berita Acara

Sebagaimana halnya persidangan biasa,sidang pemeriksaan setempat pun harus dituangkan dalam berita acara.yang disebut berita acara pemeriksaan setempat.yang bertugas membuatnya adalah panitia.hal itu ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR,Pasal 211 RV ayat (2).ketentuan ini sejalan dengan pasal 186 HIR,yang menegaskan:

- a. panitia membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.
- b. berita acara ditandatangani oleh hakim dan panitia,
- c. jika hakim atau panitia tidak dapat menandatangani,hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.

4) Membuat Akta Pendapat

Hal ini diatur dalam pasal 211 ayat (1) RV. selain panitera membuat berita acara sidang pemeriksaan setempat,, hakim yang ditugaskan untuk melaksanakan ,diharukan untuk membuat akta pendapat yang berisi penilaian atau hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Untuk membuat akta yang objektif dan Realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sudah barang tentu akta pendapat harus konsisten dengan berita acara , karena rujukan akta itu adalah berita acara itu sendiri.

6. Pendelegasian Pemeriksaan Setempat

Dalam Pasal 180 ayat 3 dan Pasal 213 RV, mengatur tentang pendelegasian pelaksana sidang pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam wilayah hukum PN yang lain. Apabila pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam wilayah hukum PN yang lain, disebabkan objek barang itu terletak di Wilayah Hukum PN yang dimaksud, Pemeriksaan dilimpahkan kepadanya. Pelimpahan itu, sesuai dengan prinsip atau patokan yuridiksi relatif yang dimiliki Setiap PN, hanya terbatas pada daerah hukumnya saja. Jika diperlukan pemeriksaan sesuatu di luar daerah hukumnya, maka harus dilaksanakan oleh PN yang bersangkutan dengan jalan mendelegasikan kepadanya. Sistem ini merupakan aturan yang bersifat tata tertib beracara yang harus dipenuhi oleh Setiap PN.

7. Biaya Pemeriksaan Setempat

Mengenai biaya atau ongkos pemeriksaan setempat telah diatur dalam pasal 214 RV, sesuai dengan patokan berikut :

a. Dibebankan Kepada Pihak yang Meminta

Patokan pertama, siapa yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum, dibebankan kewajiban :

- 1) Membayar Panjar biaya pemeriksaan
- 2) Dan biaya itu, dibayar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.

Biaya tentang ini, sama dengan pembayaran biaya panjar perkara yang disebut dalam pasal 121 ayat 1 HIR, yang menegaskan bahwa sebelum gugatan di register oleh panitera maka penggugat terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara yang telah dilakukan.

b. Hakim sendiri yang menentukan

Apabila pemeriksaan setempat dilakukan bukan atas permintaan oleh salah satu pihak, tetapi perintah hakim secara ex officio maka beban pembayaran biaya panjar ditentukan oleh hakim itu sendiri. Hakim bebas untuk menentukan kepada siapa dipikulkan pembayaran panjarnya. Dapat dipikulkan Kepada Penggugat atau Terugat.

Namun hal ini hakim seharusnya Realistis sesuai dengan Asas Kepatutan. Tidak patut hakim memberikannya kepada pihak yang berekonomi lemah. Oleh karena itu, selain bertitik tolak dari asas bahwa yang dianggap paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat maka urutan pertama yang layak dibebani panjar biaya adalah pihak penggugat.

Akan tetapi, jika pihak tergugat secara nyata dalam keadaan berekonomi kuat, maka dianggap beralasan untuk membebankannya pada pihak tergugat.

Tentang hal ini perlu diingat kembali bunyi dari pasal 160 ayat 2 HIR. Jika pihak yang dibebani enggan atau tidak mau membayar, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilakukan.

c. Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat

Komponen Pokok menurut pasal 214 RV adalah ongkos jalan. Komponen inilah yang umum, yaitu biaya perjalanan pemeriksaan setempat dari yang paling sedikit yaitu dua orang yang terdiri dari Hakim dan Panitera.

Mengenai besarnya ongkos jalan, tergantung pada jauhnya jarak antara kantor PN dengan letak tempatnya barang. Dasar perhitungan yaitu Transportasi yang dapat digunakan ke tempat tersebut.

Tetapi tidak mengurangi biaya saksi atau ahli jika memang ada. Akan tetapi dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian, perhitungan panjar biaya, meliputi juga ongkos yang diperlukan untuk itu sesuai dengan kewajarannya.

Berdasarkan Pasal di atas maka komponen biaya panjar dari pemeriksaan setempat tidak sebanyak yang disebut dalam pasal 182 HIR, yang terdiri dari :

- 1) Biaya Kantor Panitera dan biaya materai
- 2) Biaya pemeriksaan setempat
- 3) Biaya Saksi, ahli dan Juru Bahasa
- 4) Biaya Pemanggilan
- 5) Biaya yang disebut dalam pasal 138 HIR
- 6) Biaya Eksekusi

8. Nilai Kekuatan Pembuktian

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termaksud sebagai alat bukti yang disebut dalam pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata, atau pasal 283 RBG. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

a. Sebagai Keterangan Bagi Hakim

Baik dalam pasal 153 ayat 1 HIR, dan Pasal 180 ayat 1 RBG, dan Pasal 211 RV Menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat , dapat dijadikan keterangan bagi hakim.

Kalau begitu nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitive atas barang yang dipersengketakan. Namun, kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitive dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tidak lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan dari pemeriksaan setempat , berarti keterangan tersebut sama halnya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dipersidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil keputusan.

Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

b. Variable nilai kekuatan dalam putusan peradilan

Tanpa mengurangi penjelasan diatas , ada baiknya diperhatikan variable nilai kekuatan mengikatnya dalam putusan peradilan

1) Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan

Prinsip ini tetap dapat dijadikan dasar pertimbangan patokan yang digunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Pendapat itu antara lain dikemukakan dalam putusan MA No. 1497K/Sip/1983. Menurut putusan ini hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman . sering menjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.

2) Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan

Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sama luasnya dengan yang dicantumkan dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan yang dimaksud, dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan. Hal ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No. 3197 K/Sip/1983. Yang berpendapat, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan. Ternyata yang dikabulkan sama dengan posita dan petitum gugatan yang kebetulan sama pula dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga tidak melanggar *asas ultra petitum partium* yang digariskan pada pasal 178 ayat 3 HIR

3) Dapat dipergunakan menentukan lokasi.

Daya pengikat yang lain, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas tanah objek berperkara. Sifat daya kekuatannya memang tidak mutlak, tetapi fakultatif yakni dapat. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No.

1777K/Sip/1983. Dikatakan hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara. Sehubungan dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara.²⁹



²⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) h..779 - 789

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Polewali Mandar kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pengambilan lokasi penelitian ini dikarenakan penulis menemukan banyak masalah-masalah terkait pemeriksaan setempat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok,

¹Andi rustandi, "metode penelitian empiris & normatif" <http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, 04 november 2017, 21:45 WITA.

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan bergaicara yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar , melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas, sehingga keterangan akan nampak jelas.² Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang ditujukan hakim atau pihak-pihak yang mengetahui atau paham mengenai pemeriksaan setempat.

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 72.

3. Study dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

E. Instrument Penelitian

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara.

3. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi Data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.

3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan .

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilaaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian

Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Polewali Mandar

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim atau majelis hakim tersebut datang ke tempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K?/dt/1984. Secara konsepsional, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (obscuur libel).¹

Pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis hakim minimal satu orang dan dibantu panitera karena jabatannya atas permintaan para pihak (Vide Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv) yang tidak memerlukan persetujuan tergugat. Permintaan para pihak tersebut diputuskan dan dituangkan dalam Putusan Sela (Interlocutoir Vonnis).²

¹Mashudi Hermawan, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 151.

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Penyitaan, Putusan Pengadilan*, h. 783.

Syarat-syarat pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut (Vide Pasal 153HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv):

- a. dihadiri para pihak;
- b. datang ketempat objek sengketa;
- c. panitera membuat berita acara;
- d. hakim membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan

1. Keberlakuan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Polewali Mandar

Sejak tahun 2004 Pengadilan Negeri Polewali Mandar telah memberlakukan pemeriksaan setempat (untuk selanjutnya disingkat PS) namun dalam penerapan awalnya belum maksimal dikarenakan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk PS itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada hakim dan panitera muda menjelaskan bahwa dulu pada saat PS ingin diberlakukan ada masalah salah satunya biaya dalam melaksanakan pemeriksaan ini.³

Hingga pada tahun 2009 sampai sekarang PS di Pengadilan Negeri Polewali Mandar telah diberlakukan dengan sistem yang cukup maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkara perkara perdata yang masuk untuk diadili di Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang mengharuskan untuk dilakukannya PS Perkara tersebut akan digambarkan pada Tabel dibawah ini.

³Rachmat Ardinal T, Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 20 Maret 2018

TABEL I

Perkara Perdata Tahun 2014-2017

NO	Jenis Perkara	PUTUSAN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Perkara perdata yang masuk	23	25	47	41
2.	Perkara yang putus	28	14	28	30
3.	Perkara yang belum selesai	11	12	19	11

(Sumber Data Pengadilan Negeri Polewali Mandar)

Pada table di atas dapat di simpul bahwa Pengadilan Negeri Polewali Mandar dalam penerimaan mengenai kasus yang dalam ruang lingkup perdata tiap tahunnya sudah mengalami peningkatan yang cukup baik walaupun pada tahun 2017 mengalami penurutan perkara yang masuk sekitar 11% dari tahun 2016. Perkara yang sudah putus jumlahnya juga sudah cukup baik tiap tahunnya. Walaupun tiap tahunnya masih ada perkara yang belum selesai namun jumlahnya lebih sedikit dari jumlah perkara yang telah di putus.

Hal lain yang menyebabkan adanya beberapa perkara yang belum selesai dikarenakan perkara tersebut masuk di bulan-bulan terakhir dan beberapa juga karena beberapa perkara sering mengalami menundaan sidang dikarenakan satu dan lain hal dari pihak-pihak bersangkutan.

TABEL II
Jumlah Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Tahun 2014-2017

NO.	Perkara yang Menggunakan Pemeriksaan Setempat	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Yang mendaftarkan ke PN	16	15	22	17
2.	Pengajuan Banding	5	3	5	3
3.	Pengajuan kasasi	2	-	-	-
4.	Berkekuatan Hukum tetap	1	4	10	4
5.	Dicabut	4	7	7	2
6.	Niet Onivankelijke Verklaard (NO)	4	-	-	-
7.	Eksepsi diterima	-	-	-	1
8.	Gugur	-	1	-	-
9.	Masih Berlangsung	-	-	-	5

(Sumber Data Penelitian Sudah Di Olah)

Pada tabel I dan II diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Polewali Mandar sejumlah 23 perkara. Namun yang mengenai perkara tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat sebanyak 16 (Enam belas) perkara telah masuk di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, namun dari 16 (Enam belas) perkara tersebut hanya 1 (satu) perkara yang berkekuatan tetap, 4 (Empat) perkara yang dicabut oleh pihak pengugat, 4 (Empat)

perkara yang putusannya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dan 7 (tujuh) perkara yang mengajukan ketingkat banding atau kasasi.

Pada tahun 2015 jumlah perkara perdata yang masuk yaitu 25 (Dua puluh lima) perkara dengan jumlah kasus yang menerapkan pemeriksaan setempat sejumlah 15 (Lima Belas) perkara dengan rincian 4 (Empat) perkara yang berkekuatan hukum tetap, 7 perkara yang dicabut oleh pihak pengugat, dan 1 perkara yang dinyatakan gugur.

Tahun 2016 jumlah perkara yang masuk yaitu 47 (Empat puluh tujuh) perkara dengan melaksanakan pemeriksaan setempat sejumlah 22 (dua puluh dua) perkara, pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. 10 (sepuluh) yang berkekuatan hukum tetap, 7 (tujuh) perkara yang dicabut oleh pihak pengugat dan 5 (Lima) perkara yang mengajukan ketingkat banding.

Tahun 2017 jumlah perkara yang masuk sejumlah 41 (Empat puluh satu) perkara dengan 17 (Tujuh belas) perkara yang menerapkan pemeriksaan setempat hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun ini 4 (Empat) perkara yang berkekuatan hukum tetap, 3 (tiga) perkara yang mengajukan banding, 1 (satu) perkara yang eksepsi tergugat diterima, dan 5 (lima) perkara masih berlangsung sampai saat ini.

Jika kita lihat pada table I dan II terjadi perbedaan antara jumlah perkara perdata yang masuk dan jumlah perkara perdata yang melakukan PS. Hal ini sangat

wajar karena kasus perdata sangatlah banyak contoh kasus tentang perceraian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, permohonan, sengketa dll.

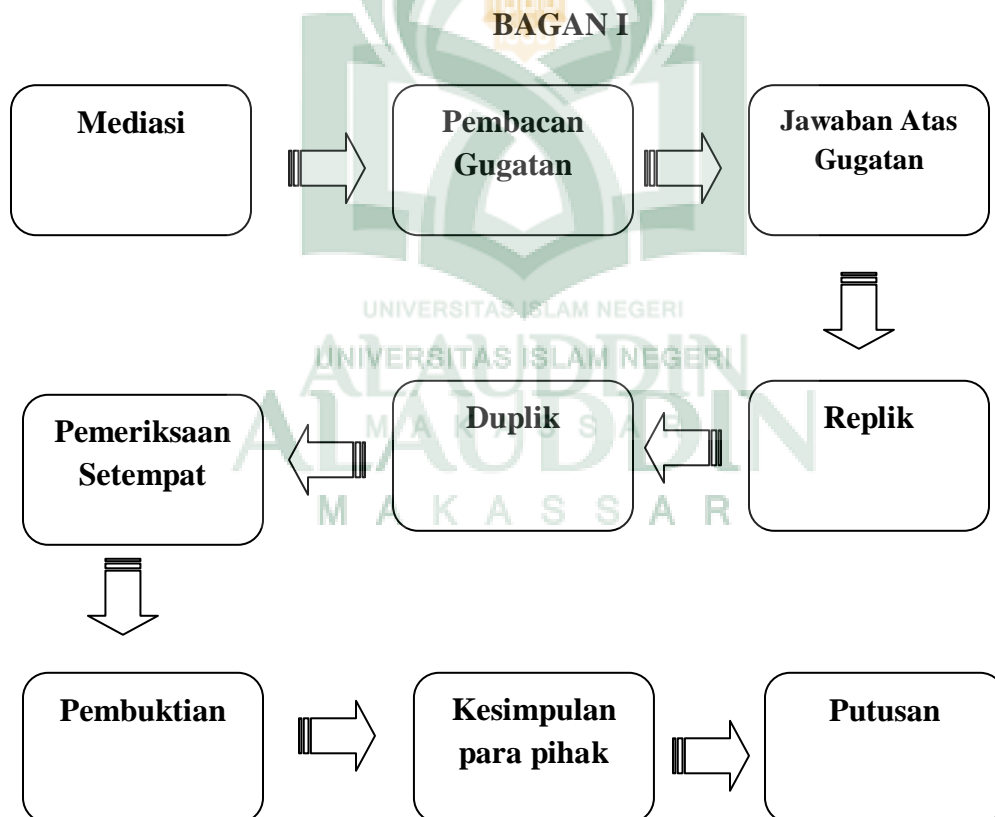
Alasan mengapa perkara tersebut ada beberapa yang tidak melakukan PS dikarenakan yang perkara yang objeknya tidak dapat di hadirkan dipersidangan atau objek benda tidak bergerak saja lah yang bisa dilakukan PS atau kadang para pihak tidak meminta untuk melakukan PS sesuai di jelaskan dalam tinjauan teoritis bahwa PS dilaksanakan jika pihak-pihak yang berkepentingan memintanya.

Dari hasil penelitian penulis bahwa jenis perkara perdata yang paling banyak masuk di Pengadilan Negeri Polewali yaitu pertama, perkara Perceraian sedangkan kasus tentang sengketa objek benda yang tidak bergerak atau benda yang tidak dapat di hadirkan di persidangan (salah satu contohnya kasus sengketa tanah) menduduki posisi ke dua.

Hal ini menurut penulis, tidak terlalu banyaknya kasus mengenai sengketa tanah atau objek yang tidak bergerak di karenakan pertama, di wilayah Polewali Mandar terutama wilayah-wilayah yang di lumayan jauh dari kota Polewali, dalam menyelesaikan kasus sengketa mereka lebih mengutamakan dilakukan secara Musyawarah untuk mendapatlkan mufakat. jika nanti tidak di temukan titik terang barulah mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Kedua karena sebagian besar masyarakat Polewali Mandar pekerjaan utamanya adalah Bertani maka saat kasus sengketa di bawah kerana Pengadilan sangat memakan biaya dan waktu yang cukup banyak.

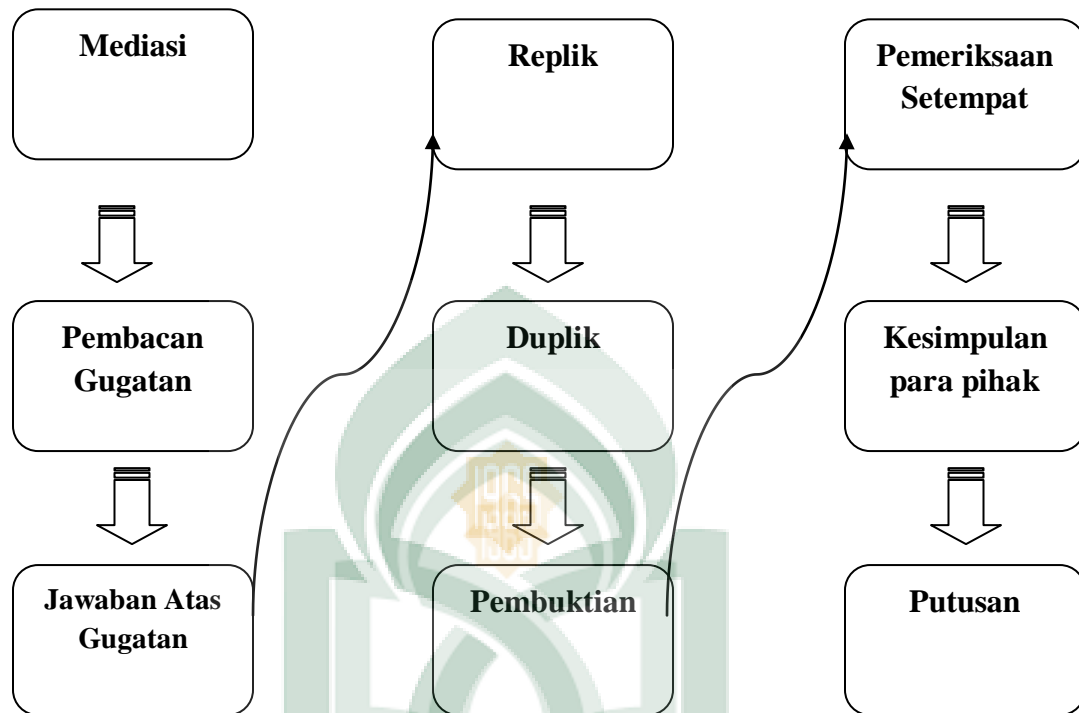
2. Sistem Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dalam penerapan pemeriksaan setempat menganut 2 (dua) sistem, pertama pemeriksaan setempat dilakukan sebelum diadakan sidang pembuktian dan kedua dilakukan pemeriksaan setempat setelah dilakukannya sidang pembuktian. untuk lebih jelasnya sistem tersebut dijelaskan pada bagan 1 dan 2 dibawah ini. Penerapan kedua sistem tersebut tergantung dari siapa ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.⁴



⁴Rachmat Ardinat T, Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 20 Maret 2018

BAGAN II



Dari dua bagan diatas menggambarkan bahwa di Pengadilan Negeri Polewali Mandar terdapat 2 versi dalam menerapkan pemeriksaan setempat, versi pertama dijelaskan di bagan I dimana ketua majelis menerapkan pemeriksaan setempat terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan alat bukti sedangkan bagan II menggambarkan dimana ketua majelis hakim menerapkan melakukan pembuktian alat bukti setelah itu melakukan pemeriksaan setempat.

Dari kedua versi tersebut sebenarnya tidak ada yang salah karena dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul “Hukum Acara Perdata” tidak dijelaskan mengenai dimana letak pemeriksaan tersebut dan dalam undang-undang belum ada yang

mengatur apakah pemeriksaan setempat itu dilaksanakan setelah atau sesudah Pembuktian

Menurut analisis penulis kelebihan dari dilaksanakannya PS sebelum sidang pembuktian yaitu hasil PS dapat menjadi rujukan dan hasilnya bisa di perkuat oleh alat bukti yang di ajukan pihak yang merasa diuntungkan atas PS tersebut sedangkan jika PS di lakukan setelah proses pembuktian selesai maka bisa terjadi perbedaan antara fakta-fakta yang terjadi di persidangan dengan fakta yang terjadi saat PS berlangsung.

Di Pengadilan Negeri Polewali mandar pun hakim dalam melaksanakan PS lebih sering di tempatkan sebelum persidangan pembuktian di bandingan melaksankana PS setelah proses pembuktian selesai.

Dari hasil wawancara dengan hakim bahwa alur saat pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Polewali Mandar yaitu mula- mula hakim membuka sidang secara formal seperti halnya saat di ruang sidang pengadilan setelah itu hakim melihat bukti-bukti dari para pihak, baik keterangan dari kepala desa atau lurah ataupun pihak-pihak yang berkepentingan, setelah itu jika di hadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka pihak BPN akan mengukur objek sengketa dan hakim akan memeriksa apakah letak, batas dan status dari objek tersebut sesuai dengan apa yang telah di tuangkan dalam isi gugatan, setelah itu hakim akan membuat akta pendapat setelah semua selesai hakim menutup kembali sidang untuk di lanjutkan kembali di ruang sidang di pengadilan⁵.

⁵Rachmat Ardinal T, Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 20 Maret 2018.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan, hanya tempat persidangnya yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat letaknya objek perkara, maka dari itu semua pihak-pihak yang berkepentingan harus hadir saat pelaksanaan pemeriksaan setempat. Pihak yang berkepentingan dalam perkara yaitu :

Majelis Hakim :Yang hadir dalam persidangan minimal salah seorang anggota majelis hakim tetapi boleh juga ketiga-tiganya.dalam dalam versi HIR dan RBG hakim anggota yang di tunjuk menjadi pelaksana pemeriksaan setempat disebut Komisaris.

Panitera :Mendampingi majelis hakim dan membuat berita acara pemeriksaan setempat

Ahli :Dalam proses pemeriksaan setempat jika diperlukan, boleh menghadirkan ahli guna membantu hakim membuat akta pendapat

Aparat keamanan: Jika setempat objek sengketa tidak kondusif maka di butuhkan aparat kemanan untuk mengawal jalannnya proses pemeriksaan setempat.

BPN : Jika diperlukan maka kadang para pihak ataupun majelis hakim mengutus badan petanahan nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pertanahan

Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak terlepas dari biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak pengugat atau tergugat mulai dari biaya pemanggilan ahli/Badan Pertahanan Nasional (BPN) jika diperlukan, dan akomodasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, maka itu untuk menghindari terjadinya

menyelewengan dalam penetapan biaya pemeriksaan setempat untuk itu pengadilan mengeluarkan penetapan biaya pemeriksaan setempat yang disepakai juga oleh ketua pengadilan agama polewali .

Menurut analisa penulis konsekuensi jika majelis hakim atau komisaris yang ditunjuk untuk melakukan PS yaitu

- a. Jika dua atau tiga komisaris yang di tunjuk dalam PS maka akan lebih objektif dari pada hanya satu komisaris yang di tunjuk
- b. Jika lebih satu komisaris yang di tunjuk maka kemungkinan biaya yang tak terdugapun akan lebih banyak
- c. Menjadwalkan untuk komisaris lengkap hadir saat PS biasa memerlukan waktu yang lama dikarenakan tiap hakim punya jadwal sidang berbeda-beda.

Dalam surat keputusan ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar kelas II No. W22-u21/02/KPN/Pdt.02/SK/II/2017 tentang biaya pemeriksaan setempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar (terlampir), bahwa biaya pemeriksaan setempat tidak sama disetiap kecamatan, desa atau lurahan semua itu tergantung seberapa jauh radius tempat lokasi objek sengketa dari Pengadilan Negeri Polewali.

4. Kendala Melakukan Pemeriksaan Setempat

Dalam penerapan pemeriksaan setempat hakim sering menghadapi kendala-kendala yaitu⁶ :

- a. objek sengketa

Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg tidak menyebutkan benda yang dilaksanakan pemeriksaan setempat apakah benda bergerak atau benda tidak

⁶Rachmat Ardinal T, Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 20 Maret 2018

bergerak, sedangkan menurut Pasal 211 ayat (2) RV. Pemeriksaan setempat dapat di laksanakan terhadap benda yang bergerak tetapi sulit di bawa keruang sidang, menurut Surat Endaran Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2010 pemeriksaan setempat dikususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut di eksekusi. Jika beberapa ketentuan tersebut di pahami secara cermat, bahwa pemeriksaan setempat itu di laksanakan untuk memeriksa benda tidak bergerak dan benda bergerak tetapi yang sulit di bawa di persidangan.⁷

b. Keamanan

Ketidaktahuan masyarakat tentang pemeriksaan setempat membuat mereka berfikir bahwa melakukan pemeriksaan setempat artinya pihak pengadilan ingin melakukan eksekusi terhadap objek sengketa, sehingga dari beberapa pihak sering menghalang-halangi sehingga dibutuhkan aparat keamanan (POLISI) untuk mengawal jalannya pemeriksaan setempat

c. Biaya

Biaya pemeriksaan setempat yang cukup mahal untuk kalangan menengah kebawah membuat kadang para pihak tidak ingin melakukan pemeriksaan setempat sehingga sangat menyulitkan majelis hakim saat melakukan putusan nantinya.

B. Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Polewali Mandar

Dalam suatu pembuktian perkara perdata di kenal dengan beberapa alat bukti yang dijelaskan dalam pasal 1866 KUHPerdata yaitu Alat bukti surat, saksi,

⁷<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1978/1/RAHMAT%20BUNYADRI.pdf>. Tgl 02 Mei 2018.16.24 WITA

persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Walaupun pemeriksaan setempat tidak dikategorikan sebagai alat bukti yang dijelaskan dalam KUHPerdara namun pemeriksaan setempat ini memegang peran yang sangat penting dalam pembuktian perkara perdata itu sendiri.

Pemeriksaan setempat seyogyanya merupakan bagian dari proses pembuktian yang berperan untuk menerangkan suatu perkara yang sedang diadili yang yang obyek adalah merupakan benda yang tidak bisa dibawa dan dihadirkan dalam persidangan (tanah). Oleh karena terkadang ada perkara yang secara bukti otentik (surat) berbeda dengan yang ada dilapangan. Seperti contoh kasus dibawah ini yang di adili dan diperiksa di Pengadilan Negeri Polewali Mandar.

Kasus Posisi

Gambaran umum mengenai kasus ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh pengugat yaitu Hj. Belo Ittang binti Abdullah , Hasanuddin bin Abdullah dan DRS. H. Badaruddin bin Abdullah terhadap tergugat yaitu kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Polewali Mandar dan kepala sekolah dasar inpres No 044 kampung baru , dikatakan bahwa pengugat memiliki tanah warisan seluas $\pm 2.025 \text{ M}^2 / \pm 45 \times 45 \text{ M}^2$ terletak di jalan poros Polman-Majene, dusun Galung Tulu Kec. Balanipa kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : jalan poros Polman- Majene
- b. Sebelah Timur : rumah Jalil, Ami, Saiful , Ismail
- c. Sebelah selatan : tanah milik para penggugat /Kalong (Daenna Masura)
- d. Sebelah barat : tanah Ruhani/Ahmad

Tentang Duduk Perkara

Pengugat adalah ahli waris tanah dari alm. Kalobang Daenna Masura (saudara kandung dari ibu pengugat) yang memiliki objek sengketa saat ini. Pada sekitar tahun 1979-1980 Kepala desa setempat bertemu dengan pengugat untuk meminjam objek sengketa tersebut untuk di bangun sebuah sekolah dasar, para pengugatpun meminjamkan tanah tersebut dengan syarat jika pengugat sudah membutuhkannya maka objek sengketa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak pengugat namun dalam eksepsi tergugat menjelaskan bahwa saat itu kepala desa tidak meminjam tetapi meminta kepada St. Riamani (ibu kandung pengugat) dan St. Riamani memberikan tanah tersebut tanpa syarat apapun.

Tentang Perimbangan Hukum

Untuk mengetahui batas-batas dan letak tanah objek sengketa maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat namun ditemukan perbedaan pendapat mengenai luas objek sengketa dimana piha pengugat dengan isi gugatannya mengatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut seluas $\pm 2.025 \text{ M}^2$ sedangkan tergugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah $\pm 2.205 \text{ M}^2$, dikarenakan perbedaan tersebut maka pihak tergugat mengajukan pemeriksaan setempat kedua dengan menghadirkan Badan Pertahanan Nasional selaku lembaga yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan.

Dari hasil pemeriksaan setempat kedua tersebut di temukan bahwa luas tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah 2.045 M^2 yang mana luas tanah tersebut berbeda dengan versi pengugat maupun tergugat. Dan ditemukan perbedaan batas-batas objek sengketa, dimana dalam surat gugatannnya batas sebelah selatan adalah tanah milik para pengugat / Kalobang sedangkan hasil pemeriksaan setempat sebelah

selatan adalah tanah milik Hamzah, tanah milik, Rusdi, tanah milik Haruna. Selain itu berdasarkan hasil pengukuran Badan Pertahanan Nasional terdapat tanah milik Rusdi seluas 17 M² yang masuk kedalam objek sengketa yang digugat oleh para pengugat sedangkan ternyata bahwa Rusli tidaklah ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo.

Dengan pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim dan mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maka majelis hakim memutuskan

1. Menyatakan gugatan para pengugat tidak dapat diterima
2. Menghukum para pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 866.000,-

Dalam perkara ini telah sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973 dengan kaidah hukum yang menyatakan “karena , setelah diadakannya pemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak diterima”. Putusan Mahkamah agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1974 yang menyatakan “kalau objek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1973 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima” dan putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 mei 1977 yang menyatakan “karena ternyata sebagian objek yang disengketakan pengugat tidak lagi dikuasai oleh tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan hukum objektif , pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.

Kasus ini membuktikan bahwa pemeriksaan setempat adalah merupakan upaya/peran dalam pembuktian untuk membuktikan kebenaran materil yang tidak diungkapkan didalam surat.

Yahya Harahap dalam buku mengungkapkan Jika tidak dilakukan pemeriksaan setempat maka bisa saja terjadi *non-executable* atau tidak dapat di eksekusinya suatu perkara , putusan perkara tersebut hanya sebuah putusan yang berada di atas kertas semata, dikarenakan bisa saja letak, batas, ukuran atau luas objek sengketa yang dijelaskan dalam gugatan berbeda dengan objek sesungguhnya.

Jika kita mengkontekskan hal ini pada teori pembuktian yang telah dipaparkan pada BAB II Tinjauan Teoritis tentang kekuatan hukum pembuktian .maka sejatinya kekuatan hukum pemeriksaan setempat termasuk didalam kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Hal ini dikarenakan penilaian terhadap alat bukti pemeriksaan setempat diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, di peroleh kesimpulan terkait pemeriksaan setempat sebagai salah satu upaya untuk mempermudah membuktikan perkara perdata, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan pemeriksaaan setempat di Pengadilan Negeri Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana cukup baik hal ini data dilihat berdasarkan data perkara yang melaksanakan pemeriksaan setempat.
2. Kekuatan hukum pemeriksaan setempat adalah bersifat *Vrij bewijskracht* atau pembuktian bebas, semua di serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh penulis terhadap masalah dalam tulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Pengadilan negeri Polewali perlu mengadakan sosialisasi atau penjabaran di papan pengumuman mengenai proses pemeriksaan setempat itu sendiri sehingga antara masyarakat awam dan pihak pengadilan tidak terjadi kesalahpahaman yang kadang mempersulit jalannya proses penyelesaian perkara.

2. Pengadilan Negeri Polewali setiap mengadakan PS untuk membawa aparat keamanan untuk menjaga kesterilan saat proses PS berlangsung.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana : Jakarta
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 2011. Departemen Agama RI. Jakarta: Syaamil Qur'an.
- Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Al-Musnad Li Ima>M Ah}Mad Bin H}Anbal*, Juzii (T.T., Muassasah Al-Risa>Lah, 1421 H/2001 M),
- Aprianti, Rieya. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*, Skripsi: Tidak Dierbitkan. Universitas Indonesia
- Asnawi, M. Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*. UII Press: Yogyakarta
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teory & Hukum Pembuktian*, Erlangga: Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1980. *Beberapa Azaz Pembuktian Perdata Dalam Praktik*. Liberty : Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Tujuh*. Liberty: Yogyakarta
- Moh. Taufik Makarao. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. PT Cipta Aditya Bakti : Bandung
- Muljono, Wahyu. 2012. *Teori & Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Pustaka Yustisia : Yogyakarta
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soeparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Mandar Maju : Semarang.
- Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Acara Dan Proses Persidangan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Subekti. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta

Sugeng, Bambang. Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana : Jakarta.

Susilo, R. 1995. *RBG/HIR Dengan Penjelasan*. Politeia: Bogor.

Syahrani, Riduan. 1991. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Alumni: Bandung.

Yahya Harahap, M. 2015 . *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Cet. Lima Belas*. Sinar Grafika : Jakarta .

Perundang-undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001

M@Hrif Labs, KUH Perdata Elektronik

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata
Internet

Informasi pendidikan, “pengertian hukum normatif”, <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> 04november 2017 ,21:26 WITA.

<http://eprints.ums.ac.id/31931/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, 18november2017, 22.00 wita

Andi rustandi, “metode penelitian empiris & normatif”
<http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, 04november2017, 21:45 WITA.

[http://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata.tgl.05 mei 2018. 02.00 WITA](http://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata.tgl.05%20mei%202018.02.00%20WITA)

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT
DI PENGADILAN NEGERI POLEWALI MANDAR**

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BIAYA
1	POLEWALI	Polewali	Rp. 3.000.000,-
		Wattang	Rp. 3.000.000,-
		Solewatang	Rp. 3.000.000,-
		Takatidung	Rp. 3.000.000,-
		Pekkabata	Rp. 3.000.000,-
		Manding	Rp. 3.000.000,-
		Darma	Rp. 3.000.000,-
2	ANREAPI	Anreapi	Rp. 4.000.000,-
		Duampanua	Rp. 4.000.000,-
		Pappandangan	Rp. 4.000.000,-
		Kelapadua	Rp. 4.000.000,-
		Kunyi	Rp. 4.000.000,-
3	BINUANG	Kuajang	Rp. 5.000.000,-
		Paku	Rp. 5.000.000,-
		Tonyaman	Rp. 5.000.000,-
		Mirring	Rp. 5.000.000,-
		Batetangnga	Rp. 5.000.000,-
		Amassangan	Rp. 5.000.000,-

		Mammi	Rp. 5.000.000,-
4	MATAKALI	Matakali	Rp. 3.000.000,-
		Tonrolima	Rp. 3.000.000,-
		Indo makkombong	Rp. 3.000.000,-
		Barumbung	Rp. 3.000.000,-
		Patampanua	Rp. 3.000.000,-
		Pasiang	Rp. 3.000.000,-
5	WONOMULYO	Nepo	Rp. 3.500.000,-
		Kebunsari	Rp. 3.500.000,-
		Arjosari	Rp. 3.500.000,-
		Bumiayu	Rp. 3.500.000,-
		Bumimulyo	Rp. 3.500.000,-
		Sidorejo	Rp. 3.500.000,-
		Sidodadi	Rp. 3.500.000,-
		Campurjo	Rp. 3.500.000,-
		Sumberjo	Rp. 3.500.000,-
		Sugihwaras	Rp. 3.500.000,-
		Banuabaru	Rp. 3.500.000,-
		Bakkabakka	Rp. 3.500.000,-
		Tumpiling	Rp. 3.500.000,-
		Galeso	Rp. 3.500.000,-
		Mampie	Rp. 3.500.000,-

6	TAPANGO	Batu	Rp. 4.500.000,-
		Bussu	Rp. 4.500.000,-
		Dakka	Rp. 4.500.000,-
		Kurrak	Rp. 4.500.000,-
		Palatta	Rp. 4.500.000,-
		Pelitakan	Rp. 4.500.000,-
		Rappang	Rp. 4.500.000,-
		Riso	Rp. 4.500.000,-
		Tapango	Rp. 4.500.000,-
		Tapango Barat	Rp. 4.500.000,-
7	MATTANGNGA	Lili	Rp. 6.000.000,-
		Katimbang	Rp. 6.000.000,-
		Mambu Tapua	Rp. 6.000.000,-
		Rangoang	Rp. 6.000.000,-
		Matangnga	Rp. 6.000.000,-
8	LIMBORO	Limboro	Rp. 5.000.000,-
		Napo	Rp. 5.000.000,-
		Samasundu	Rp. 5.000.000,-
		Renggeang	Rp. 5.000.000,-
		Tandasura	Rp. 5.000.000,-
		Lembang-lembang	Rp. 5.000.000,-

		Salarri	Rp. 5.000.000,-
		Todang todang	Rp. 5.000.000,-
		Pendulangan	Rp. 5.000.000,-
		Tangan baru	Rp. 5.000.000,-
		Palece	Rp. 4.000.000,-
		Tandassura	Rp. 4.000.000,-
9	BALANIPA	Balanipa	Rp. 4.000.000,-
		Tamangalle	Rp. 4.000.000,-
		Salungsubik	Rp. 4.000.000,-
		Pambusuang	Rp. 4.000.000,-
		Masso	Rp. 4.000.000,-
		Gasalung tulu	Rp. 4.000.000,-
		Bala	Rp. 4.000.000,-
		Tammajarta	Rp. 4.000.000,-
		Lembanan	Rp. 4.000.000,-
		Lego	Rp. 5.000.000,-
		Palis	Rp. 5.000.000,-
10	ALLU/TUTALLU	Alu	Rp. 5.000.000,-
		Mombi	Rp. 5.000.000,-
		Paopao	Rp. 5.000.000,-
		Pupauring	Rp. 5.000.000,-
		Saragiang	Rp. 5.000.000,-

		Sayoang	Rp. 4.500.000,-
		Kalumammang	Rp. 4.500.000,-
11	CAMPALAGIAN	Bonde	Rp. 4.500.000,-
		Botto	Rp. 4.500.000,-
		Katumbangan	Rp. 4.500.000,-
		Katumbangan lemo	Rp. 4.500.000,-
		Kenje	Rp. 4.500.000,-
		Laliko	Rp. 4.500.000,-
		Lampoko	Rp. 4.500.000,-
		Lapeo	Rp. 4.500.000,-
		Lemo	Rp. 4.500.000,-
		Ongko	Rp. 4.500.000,-
		Panyampa	Rp. 4.500.000,-
		Pappang	Rp. 4.500.000,-
		Parappe	Rp. 4.500.000,-
		Sumarang	Rp. 4.500.000,-
		Suruang	Rp. 4.500.000,-
		Botto	Rp. 4.000.000,-
		Giatungan	Rp. 4.000.000,-
12	LUYO	Tenggelang	Rp. 4.000.000,-
		Baru	Rp. 4.000.000,-
		Batupanga	Rp. 4.000.000,-

		Mambu	Rp. 4.000.000,-
		Mapili barat	Rp. 4.000.000,-
		Sumbaliwali	Rp. 4.000.000,-
		Batupanga daala	Rp. 5.000.000,-
		Luyo	Rp. 5.000.000,-
13	TINAMBUNG	Tandung	Rp. 5.000.000,-
		Tangnga-tangga	Rp. 5.000.000,-
		Karama	Rp. 5.000.000,-
		Tinambung	Rp. 5.000.000,-
		Batulaya	Rp. 5.000.000,-
		Sepabatu	Rp. 6.000.000,-
		Lekopadis	Rp. 6.000.000,-
		Galung Lombok	Rp. 6.000.000,-
14	TUBITARAMANU	Taramanu	Rp. 6.000.000,-
		Tubbi	Rp. 6.000.000,-
		Rattekallang	Rp. 6.000.000,-
		Besoangin	Rp. 6.000.000,-
		Piriang tapiko	Rp. 6.000.000,-
		Taramanutua	Rp. 6.000.000,-
		Puliwa	Rp. 6.000.000,-
		Ambopadang	Rp. 6.000.000,-
		Peda	Rp. 6.000.000,-

		Besoangin utara	Rp. 6.000.000,-
		Ratte	Rp. 6.000.000,-
		Besoangin	Rp. 6.000.000,-
		Arabua	Rp. 6.000.000,-

*Hanya Sebagian Kecamatan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ANNISYAH PUTRI LESTARI lahir di Campurjo, 25 oktober 1996, gadis yang sering sapa Nisa atau Putri ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Eddy Hartono dan Hasnawati. Memulai pendidikan bermainnya di TK Assalam tahun 2000- 2002, dan menyelesaikan wajib belajar 12 tahun di SDN 014 Sumberjo tahun 2008, SMP PPM Al-Ikhlash tahun 2011 dan SMA Negeri 1 Polewali tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di suatu perguruan yang terletak di kota Makassar, Sulawesi selatan tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dan menyelesaikannya di tahun 2018.

Selain aktif di bidang akademik, penulis juga aktif di organisasi semi otonom yaitu Ikatan Penggiat Peradilan Semu (I.P.P.S) dan menjadi bendahara umum pada periode 2016-2017.

Penulis memiliki motto hidup : **Lihatlah Segala Hal Dari Dua Sudut Pandang**